

# Pengaruh Digitalisasi Terhadap Penerimaan Negara

[Rudy C Tarumingkeng](#)

RUDYCT e-PRESS

Juli 2024

Digitalisasi berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan negara jika tidak diatur dengan baik, terutama melalui penghindaran pajak dan perubahan dalam struktur pekerjaan. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan pemanfaatan teknologi untuk administrasi pajak, digitalisasi juga dapat memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan memperluas basis pajak melalui inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu terus beradaptasi dan mengembangkan regulasi yang responsif terhadap perubahan ini untuk memastikan bahwa penerimaan negara tetap stabil dan berkelanjutan.

Digitalisasi, dengan segala manfaat dan tantangannya, memiliki dampak yang kompleks terhadap penerimaan negara. Untuk memahami potensi penurunan penerimaan negara akibat digitalisasi, mari kita telaah beberapa aspek yang relevan:

## **1. E-commerce dan Pajak Digital**

Digitalisasi mendorong pertumbuhan pesat e-commerce dan transaksi digital. Banyak perusahaan besar seperti Amazon, Google, dan Facebook beroperasi di berbagai negara tanpa kehadiran fisik yang signifikan. Hal ini menyulitkan pemerintah

untuk memungut pajak yang adil karena basis pajak tradisional didasarkan pada lokasi fisik dan penjualan langsung. Misalnya, perusahaan yang beroperasi lintas negara dapat memindahkan laba mereka ke yurisdiksi dengan pajak rendah, mengurangi potensi pendapatan pajak di negara tempat mereka beroperasi secara virtual.

## **2. Ekonomi Gig dan Pekerjaan Freelance**

Digitalisasi juga meningkatkan jumlah pekerja freelance dan kontraktor independen yang sering kali tidak tercatat secara lengkap dalam sistem pajak. Ekonomi gig, yang melibatkan platform seperti Uber, Grab, dan berbagai layanan freelance online, cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan formal. Pekerja dalam ekonomi ini mungkin tidak melaporkan seluruh pendapatan mereka, yang dapat mengurangi basis pajak yang tersedia bagi pemerintah.

## **3. Teknologi dan Efisiensi Perpajakan**

Di sisi lain, digitalisasi juga menyediakan alat yang lebih canggih untuk administrasi dan pengumpulan pajak. Teknologi big data, machine learning, dan blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan pemungutan pajak. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi ini untuk melacak transaksi, mencegah penggelapan pajak, dan memastikan kepatuhan yang lebih baik.

## **4. Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Digitalisasi dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan basis pajak. Sektor teknologi sering kali menghasilkan lapangan kerja baru dan menciptakan industri baru yang dapat menjadi sumber pendapatan pajak tambahan. Misalnya, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan banyak peluang ekonomi baru yang sebelumnya tidak ada.

## **5. Perubahan Struktur Pekerjaan**

Namun, perubahan ini juga dapat menggeser struktur pekerjaan. Otomasi dan AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa sektor, mengurangi pendapatan pajak dari gaji dan upah. Pergeseran ini mungkin mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan pajak untuk mengakomodasi sumber pendapatan baru dan mengelola pengurangan dari sektor yang terdampak.

### **Kasus: Indonesia**

Di Indonesia, digitalisasi menghadirkan tantangan dan peluang serupa. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengenakan pajak pada transaksi digital dan layanan online. Misalnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah salah satu upaya untuk menangani tantangan ini.

Digitalisasi berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan negara jika tidak diatur dengan baik, terutama melalui penghindaran pajak dan perubahan dalam struktur pekerjaan. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan pemanfaatan teknologi untuk administrasi pajak, digitalisasi juga dapat memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan memperluas basis pajak melalui inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu terus beradaptasi dan mengembangkan regulasi yang responsif terhadap perubahan ini untuk memastikan bahwa penerimaan negara tetap stabil dan berkelanjutan.

Pada era digital ini, dunia telah menyaksikan transformasi besar dalam berbagai sektor, dari perdagangan hingga

pekerjaan, yang semuanya dipicu oleh perkembangan teknologi informasi. Namun, seperti halnya dua sisi mata uang, digitalisasi membawa dampak yang beragam, termasuk potensi penurunan penerimaan negara jika tidak diatur dengan cermat.

## **Penghindaran Pajak dan Perubahan Struktur Pekerjaan**

Salah satu tantangan utama yang muncul dari digitalisasi adalah penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan multinasional, seperti Google, Amazon, dan Facebook, mampu mengoperasikan bisnisnya secara lintas negara tanpa kehadiran fisik yang signifikan di banyak tempat. Dengan menggunakan berbagai strategi, mereka dapat memindahkan laba mereka ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah, yang dikenal sebagai "profit shifting." Hal ini menyebabkan negara-negara dengan aktivitas ekonomi digital yang tinggi mengalami kebocoran pajak, mengurangi potensi penerimaan yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk pembangunan.

Selain itu, digitalisasi juga telah mengubah struktur pekerjaan secara dramatis. Munculnya platform ekonomi gig seperti Uber, Grab, dan berbagai layanan freelance online menggeser banyak pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal. Pekerja dalam ekonomi gig seringkali tidak tercatat dengan baik dalam sistem perpajakan tradisional. Sebagai kontraktor independen, mereka mungkin tidak melaporkan seluruh pendapatan mereka, atau bahkan tidak menyadari kewajiban pajak mereka. Akibatnya, basis pajak berkurang, dan negara kehilangan potensi penerimaan.

## **Pemanfaatan Teknologi untuk Administrasi Pajak**

Namun, digitalisasi juga membuka peluang baru bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi dan pengumpulan pajak. Teknologi big data, machine learning, dan blockchain dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam melacak transaksi keuangan dan mengidentifikasi pola-pola penghindaran pajak. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan

mengurangi praktik penggelapan pajak. Misalnya, analisis big data dapat membantu dalam mengidentifikasi ketidakcocokan antara pendapatan yang dilaporkan dan gaya hidup yang terlihat, sehingga memungkinkan investigasi lebih lanjut.

Blockchain, dengan sifatnya yang transparan dan tidak dapat diubah, dapat digunakan untuk mencatat transaksi secara lebih akurat dan mencegah manipulasi data. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam mendeteksi anomali transaksi yang mungkin menandakan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, teknologi ini tidak hanya membantu dalam pengumpulan pajak, tetapi juga dalam meningkatkan keadilan dan transparansi sistem perpajakan.

### **Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Digitalisasi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat memperluas basis pajak. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan banyak peluang baru, menciptakan lapangan kerja, dan membuka industri-industri baru yang sebelumnya tidak ada. Sebagai contoh, sektor teknologi dan startup yang berkembang pesat di banyak negara telah menjadi sumber penerimaan pajak yang signifikan. Inovasi ini tidak hanya menghasilkan pendapatan langsung melalui pajak penghasilan dan pajak perusahaan, tetapi juga melalui pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari peningkatan konsumsi barang dan jasa.

### **Adaptasi Kebijakan dan Regulasi**

Untuk memaksimalkan manfaat dari digitalisasi dan mengurangi dampak negatifnya terhadap penerimaan negara, pemerintah harus terus beradaptasi dan mengembangkan regulasi yang responsif terhadap perubahan ini. Kebijakan perpajakan perlu diperbarui untuk menangani tantangan yang dibawa oleh ekonomi digital. Salah satu contohnya adalah penerapan pajak digital pada layanan dan transaksi online. Di Indonesia, langkah ini telah dimulai dengan pengenaan PPN

pada barang dan jasa digital yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mampu mengakomodasi perubahan dalam struktur pekerjaan. Ini bisa mencakup pelaporan pendapatan yang lebih mudah untuk pekerja ekonomi gig dan pemberian insentif bagi mereka untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, kerjasama internasional dalam perpajakan juga menjadi penting, mengingat sifat lintas batas dari ekonomi digital. Inisiatif seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang diinisiasi oleh OECD bisa menjadi kerangka kerja yang penting dalam mengatasi tantangan perpajakan global.

Digitalisasi, dengan segala tantangan dan peluangnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara. Jika tidak diatur dengan baik, digitalisasi dapat menyebabkan penurunan penerimaan melalui penghindaran pajak dan perubahan dalam struktur pekerjaan. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan pemanfaatan teknologi untuk administrasi pajak, digitalisasi juga dapat memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan memperluas basis pajak melalui inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu terus beradaptasi dan mengembangkan regulasi yang responsif terhadap perubahan ini untuk memastikan bahwa penerimaan negara tetap stabil dan berkelanjutan.

## **Dampak Sosial dan Ekonomi dari Digitalisasi**

Selain dampak langsung terhadap penerimaan negara, digitalisasi juga membawa implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Perubahan dalam struktur pekerjaan, misalnya, tidak hanya berdampak pada pendapatan pajak, tetapi juga pada kesejahteraan pekerja. Pekerja dalam ekonomi gig sering kali tidak memiliki jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan atau dana pensiun, yang biasanya tersedia bagi pekerja formal. Ini dapat meningkatkan beban sosial bagi pemerintah, yang

harus menyediakan jaring pengaman bagi pekerja yang rentan.

### **Tantangan dalam Regulasi Internasional**

Salah satu tantangan utama dalam menghadapi digitalisasi adalah kurangnya kerangka kerja internasional yang seragam. Perusahaan teknologi besar sering kali beroperasi di banyak negara, tetapi membayar pajak di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan global. Upaya seperti Proyek BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) oleh OECD bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan menciptakan aturan yang lebih adil dan transparan. Namun, implementasi dan penegakan aturan ini memerlukan kerjasama internasional yang kuat, yang bisa menjadi tantangan tersendiri.

### **Inisiatif Pajak Digital di Berbagai Negara**

Beberapa negara telah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi tantangan perpajakan digital. Misalnya, Uni Eropa telah mengusulkan Digital Services Tax (DST) yang mengenakan pajak pada pendapatan yang diperoleh dari layanan digital. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa perusahaan teknologi besar membayar bagian pajak yang adil di negara-negara tempat mereka beroperasi. Demikian pula, di Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa transaksi digital dan layanan online dikenakan pajak dengan adil.

### **Potensi Penerimaan dari Ekonomi Digital**

Ekonomi digital juga membuka peluang besar bagi peningkatan penerimaan negara. Dengan memanfaatkan potensi dari sektor-sektor seperti e-commerce, fintech, dan layanan digital, negara dapat memperluas basis pajak mereka. Pendapatan dari iklan online, penjualan digital, dan layanan berlangganan adalah beberapa contoh sumber pendapatan baru yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas,

menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing negara.

## **Pendidikan dan Keterampilan Digital**

Pemerintah juga perlu berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan digital untuk memastikan bahwa tenaga kerja siap menghadapi perubahan yang dibawa oleh digitalisasi. Dengan meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi, pekerja dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dalam pasar kerja dan memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas dan inovasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi digital.

## **Kasus: India**

Sebagai contoh konkret, India telah menunjukkan bagaimana digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Melalui inisiatif seperti Digital India, pemerintah India telah mendorong adopsi teknologi digital dalam berbagai sektor, dari pendidikan hingga layanan publik. Sistem pajak yang lebih transparan dan terintegrasi secara digital telah meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Selain itu, dengan menyediakan akses yang lebih luas ke layanan keuangan digital, pemerintah telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

## **Masa Depan Perpajakan Digital**

Ke depan, perpajakan digital akan terus menjadi isu yang krusial bagi banyak negara. Dengan terus berkembangnya teknologi dan model bisnis baru, pemerintah harus tetap waspada dan responsif terhadap perubahan ini. Regulasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi untuk pengawasan dan administrasi pajak, serta kerjasama internasional akan menjadi

kunci dalam memastikan bahwa digitalisasi membawa manfaat yang maksimal bagi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

### **Kesimpulan yang Lebih Luas**

Digitalisasi adalah fenomena yang tak terelakkan dan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara ada tantangan signifikan yang perlu diatasi, seperti penghindaran pajak dan perubahan dalam struktur pekerjaan, ada juga peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas basis pajak melalui inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus terus beradaptasi, mengembangkan regulasi yang responsif, dan memanfaatkan teknologi untuk memastikan bahwa penerimaan negara tetap stabil dan berkelanjutan, sambil juga memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi digital yang terus berkembang.